

TATA KELOLA ASET BARANG MILIK DAERAH BERBASIS E-BMD PADA DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI

¹ Muhammad Jabbal Nur, ²Muhammad Ihsan Mattalitti, ³Riston G. Ahmad

¹ Pemerintah Kota Kendari, ^{2,3} Universitas Muhammadiyah Kendari

Correspondent author: riston@umkendari.ac.id

Kota Kendari, 93231, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Abstract

This study aims to provide an in-depth overview of the implementation of the E_BMD system in the Kendari City Agriculture Service using qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that the implementation of the E-BMD system significantly increases efficiency in the management of Regional Property (BMD). Starting from identification to asset disposal. This system facilitates real-time asset recording, increases accuracy, and transparency and facilitates a more transparent and accountable asset procurement process. Although there are obstacles to employee understanding of technology, E-BMD also allows automatic maintenance scheduling, although limited human resources and budget constrain its implementation. In asset disposal, this system helps accelerate the process of eliminating unusable assets, although employee training still needs to be improved. Overall, E-BMD has great potential to increase efficiency, transparency and accountability in regional asset management. However, optimization requires increased human resource competency and improved coordination between agencies. Recommendations include ongoing training for employees and increased budget allocation to support the operation and maintenance of the system on an ongoing basis. These findings indicate that with the right steps, E-BMD can be optimized to support more effective and efficient asset management in the future.

Keywords: Accountability; Asset Management; Efficiency; E-BMD; Good Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi sistem E_BMD di Dinas Pertanian Kota Kendari dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem E-BMD secara signifikan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Mulai dari identifikasi hingga penghapusan aset. Sistem ini mempermudah pencatatan aset secara real-time, meningkatkan akurasi, transparansi dan memfasilitasi proses pengadaan aset yang lebih transparan dan akuntabel. Meskipun terdapat kendala pemahaman pegawai terhadap teknologi E-BMD juga memungkinkan penjadwalan pemeliharaan secara otomatis, meski pelaksanaannya terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Dalam penghapusan aset, sistem ini membantu mempercepat proses penghapusan aset yang tidak layak pakai, meskipun pelatihan pegawai masih perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, E-BMD memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi dan akutabilitas pengelolaan aset daerah. Namun untuk optimalisasi diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan perbaikan koordinasi antar instansi. Rekomendasi mencakup pelatihan berkelanjutan bagi pegawai serta peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung operasional dan pemeliharaan sistem secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, E-BMD dapat dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih efektif dan efisien di masa depan.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Efisiensi; E-BMD; Good Governance; Pengelolaan Aset

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah tetap menjadi masalah klasik di banyak wilayah. Kurangnya perhatian terhadap manajemen dan pemeliharaan aset daerah secara teratur dan sesuai ketentuan terlihat dari catatan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hampir setiap tahun menunjukkan bahwa masalah utama dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah penyajian aset tetap (Syahputra et al., 2019).

Aset Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peran penting dalam mendukung operasional pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang maksimal. Pengelolaan BMD yang optimal tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan aset daerah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Simatupang et al., 2024). Pengelolaan BMD yang optimal dapat menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah, memperkuat perekonomian lokal, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, jika pengelolaannya tidak efektif, hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai aset, potensi penyalahgunaan, serta menurunnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sistem pengelolaan BMD di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021. Regulasi ini menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses pengelolaan aset daerah melalui penerapan aplikasi E-BMD (Electronic Barang Milik Daerah). Tujuan dari pengelolaan aset daerah adalah untuk memastikan laporan yang disusun dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, terutama kepada seluruh masyarakat, serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan (Kusuma Dewi & Nugraheni, 2020). Digitalisasi ini penting karena memungkinkan pencatatan aset yang lebih akurat, pemantauan yang lebih efektif, serta akses data yang lebih terbuka bagi pihak terkait. Namun seiring dengan perkembangan dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak properti, tetapi juga harus memahami jumlah serta sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki saat ini. Barang milik daerah, sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dikelola secara baik dan tepat agar pengelolaan aset daerah yang berkualitas dapat terwujud (Lahada, 2021).

Tantangan terbesar dalam implementasi E-BMD sering kali berasal dari keterbatasan teknologi yang tersedia dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai (Ali et al., 2017)i. Kurangnya infrastruktur digital yang memadai, khususnya di daerah-daerah yang lebih terpencil, menyebabkan proses pencatatan dan pelaporan aset tidak selalu berjalan

optimal. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah terkait penggunaan teknologi informasi juga menjadi penghambat dalam memastikan pengelolaan aset yang efisien dan akuntabel. Fahrurrozi et al. (2019) mencatat bahwa implementasi sistem digital seperti E-BMD membutuhkan dukungan yang kuat dalam hal pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai agar dapat berfungsi secara efektif.

Penelitian ini akan mengevaluasi implementasi sistem E-BMD di Dinas Pertanian Kota Kendari, yang menjadi salah satu sektor penting dalam pengelolaan aset daerah. Fokus utama penelitian adalah pada aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan dalam pengelolaan BMD. Keempat aspek ini merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang mana melalui penerapan E-BMD diharapkan mampu memperkuat setiap tahapan pengelolaan aset, mulai dari identifikasi, pengadaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan proses tata kelola BMD.

Melalui kajian mendalam ini, penelitian akan menyoroti dampak implementasi E-BMD terhadap efisiensi administrasi dan kualitas pengelolaan aset di Kota Kendari. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana digitalisasi dapat diintegrasikan secara efektif dalam pengelolaan aset daerah serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan tata kelola BMD, khususnya dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset di Kota Kendari, serta menyediakan kerangka acuan bagi daerah lain yang ingin menerapkan sistem serupa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi sistem E-BMD di Dinas Pertanian Kota Kendari. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu mengungkapkan fenomena secara komprehensif dan kontekstual, serta memungkinkan peneliti untuk menjelaskan secara rinci proses dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dengan pejabat terkait, observasi langsung di lapangan untuk mengamati praktik pengelolaan aset BMD, serta analisis dokumen yang relevan (Sukmadinata, 2011).

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman dari para informan kunci, seperti pejabat pengelola aset dan pengguna E-BMD. Observasi langsung

memberikan data empiris mengenai bagaimana sistem E-BMD diimplementasikan dalam konteks operasional di lapangan. Sementara itu, analisis dokumen, seperti laporan keuangan dan dokumen kebijakan, digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif menurut Miles, Huberman & Saldaña dalam (Elwan et al., 2022) dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Data dianalisis menggunakan tiga langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022) Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dan mengorganisir data yang terkumpul. Penyajian data bertujuan untuk memvisualisasikan hasil temuan secara sistematis sehingga memudahkan proses analisis lebih lanjut. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas implementasi E-BMD serta implikasinya terhadap pengelolaan aset di Kota Kendari. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai topik penelitian serta memungkinkan peneliti untuk menyusun rekomendasi yang didasarkan pada data empiris dan analisis yang cermat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Aset Barang Milik Daerah (BMD)

Teknologi Informasi (TI) merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan atau instansi (Nurul Mutiah, Theresia Meiriati, 2020). Salah satu instansi yang melakukan tata kelola TI adalah Dinas Pertanian Kota Kendari yang mengelola aset barang milik daerah yang berbasis Elektronik. Proses pengelolaan tersebut meliputi beberapa tahapan, yaitu identifikasi aset, pengadaan aset, pemeliharaan aset, dan penghapusan aset.

Identifikasi Aset

Manajemen aset pada dasarnya adalah upaya untuk mengelola aset agar dapat memberikan manfaat maksimal dengan biaya minimal, serta mencegah aset tersebut punah, kecuali jika memang perlu untuk dimusnahkan atau dihapuskan (Rusmawanti et al., 2020). Manajemen aset meliputi serangkaian kegiatan yang mencakup identifikasi kebutuhan aset, penentuan kebutuhan pendanaan, perolehan aset, penyediaan dukungan material dan perawatan aset, serta penghapusan dan pembaruan aset, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara efektif (Hastings, 2015). Identifikasi aset adalah langkah awal yang krusial dalam seluruh proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan aset yang dimiliki oleh

pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dasar bagi semua kegiatan pengelolaan selanjutnya, seperti pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset. Dalam konteks Dinas Pertanian Kota Kendari, implementasi sistem E-BMD telah memberikan kemudahan signifikan dalam proses identifikasi aset. Sistem ini mampu mencatat aset secara real-time, yang sebelumnya dilakukan secara manual dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Dengan adanya sistem digital seperti E-BMD, data aset yang dimiliki dapat diakses lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan, sehingga mengurangi potensi kesalahan administratif yang dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan aset secara keseluruhan.

Keunggulan utama E-BMD terletak pada kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai data aset dari seluruh instansi pemerintah daerah dalam satu platform yang terpusat. Sebelumnya, pencatatan aset di Dinas Pertanian dilakukan secara terdesentralisasi, di mana setiap bagian memiliki cara pencatatan yang berbeda, sehingga sering menimbulkan duplikasi dan inkonsistensi data. E-BMD tidak hanya menyederhanakan proses pencatatan ini, tetapi juga memastikan bahwa setiap aset terdaftar sesuai dengan kategori dan penggunaannya yang tepat. Penggunaan sistem digital ini juga memungkinkan adanya pemantauan aset secara berkelanjutan, di mana status dan kondisi setiap aset dapat diperbarui secara langsung oleh pihak yang bertanggung jawab, meminimalisir human error dalam pencatatan.

Dalam sistem manual, identifikasi aset sering kali memakan waktu lama dan memerlukan verifikasi manual yang berulang, sehingga memperlambat proses administrasi. E-BMD mengatasi hal ini dengan menyediakan fitur yang mempermudah identifikasi aset, termasuk pencatatan karakteristik spesifik setiap aset, seperti lokasi, nilai buku, dan pengguna aset tersebut. Dengan informasi yang tersimpan secara real-time, data aset dapat digunakan untuk keperluan perencanaan dan pengambilan keputusan, misalnya untuk pengadaan aset baru atau penghapusan aset yang tidak lagi efektif digunakan. Dengan demikian, E-BMD membantu memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah benar-benar terdata dan dapat dipantau penggunaannya.

Selain memudahkan pencatatan, E-BMD juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan efisiensi pengelolaan aset. Melalui identifikasi aset yang akurat dan terstruktur, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan aset yang lebih jelas, sehingga aset-aset yang kurang produktif atau tidak terpakai dapat segera diketahui dan dimanfaatkan kembali. Dengan sistem manual, proses ini memakan waktu yang lama dan sering kali menyebabkan aset-aset tertentu terabaikan dalam jangka waktu yang lama. E-BMD

memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki dapat digunakan dengan optimal untuk mendukung layanan publik dan program pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, identifikasi aset melalui sistem E-BMD telah memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan aset daerah, terutama di Dinas Pertanian Kota Kendari. Sistem ini tidak hanya membantu meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pencatatan aset, tetapi juga memungkinkan proses pemantauan dan pengelolaan aset yang lebih efisien. Implementasi sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance), di mana transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa aset daerah dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya E-BMD, potensi kesalahan pencatatan dapat diminimalkan, dan pengelolaan aset daerah dapat dilakukan secara lebih profesional dan sistematis.

Pengadaan Aset

Kata "pengadaan" mengacu pada proses atau tindakan dalam menyediakan dan mengadakan sesuatu. Sementara itu, "barang" merujuk pada segala sesuatu yang memiliki bentuk dan wujud (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks pengadaan aset, hal ini berarti proses yang dilakukan untuk menyediakan dan memperoleh barang yang diperlukan agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung tujuan organisasi. Pengadaan aset merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah. Di Dinas Pertanian Kota Kendari, pengadaan aset harus mengikuti prosedur standar yang telah diatur oleh regulasi terkait, seperti Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pedoman yang ditetapkan dalam Permendagri. Meskipun prosedur ini telah ditetapkan dengan jelas, implementasinya sering kali menghadapi kendala, terutama dalam hal pemahaman pegawai terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan kesalahan administrasi dan potensi pelanggaran, yang berdampak pada keterlambatan pengadaan aset dan inefisiensi anggaran.

Sistem E-BMD hadir sebagai solusi dalam memperbaiki proses pengadaan aset di Dinas Pertanian Kota Kendari. Melalui sistem ini, proses pengadaan dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel, karena setiap tahapan mulai dari perencanaan, penawaran, hingga realisasi pengadaan dapat didokumentasikan secara otomatis. Dengan adanya sistem digital ini, setiap transaksi pengadaan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan atau kesalahan yang disebabkan oleh faktor human error. E-BMD memainkan peran penting dalam memperbaiki tata kelola pengadaan dengan menyediakan sistem yang memungkinkan pelacakan

pengadaan secara real-time, yang mempercepat respons terhadap masalah yang mungkin timbul selama proses pengadaan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan aset di pemerintahan adalah memastikan bahwa aset yang diadakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan strategis. Dengan E-BMD, pemerintah daerah dapat melakukan analisis kebutuhan aset yang lebih akurat, berdasarkan data real-time yang tersimpan dalam sistem. Hal ini membantu Dinas Pertanian dalam menyusun rencana pengadaan yang lebih tepat sasaran, sehingga setiap pengadaan aset yang dilakukan bukan hanya berdasarkan estimasi, melainkan berdasarkan data yang valid dan terukur. Dengan begitu, pengadaan aset dapat dilakukan secara lebih efisien, dan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya pemborosan.

Selain itu, E-BMD juga memfasilitasi pengawasan yang lebih ketat dalam setiap tahapan pengadaan. Dengan sistem ini, pihak yang berwenang dapat dengan mudah memantau perkembangan pengadaan, mulai dari proses tender hingga penyelesaian kontrak. Data yang transparan ini memberikan jaminan bahwa pengadaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Melalui penerapan E-BMD, potensi penyimpangan dalam pengadaan dapat diminimalisir, dan proses pengadaan aset di Dinas Pertanian Kota Kendari dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola aset daerah.

Pemeliharaan Aset

Asset maintenance adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaga agar aset-aset bisnis tetap dalam kondisi yang baik dan berfungsi dengan baik (Benedictus Adithia, 2023). Pemeliharaan aset merupakan elemen kunci dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) karena bertujuan untuk menjaga nilai dan fungsi aset agar tetap optimal dalam mendukung operasional pemerintahan. Di Dinas Pertanian Kota Kendari, upaya pemeliharaan aset sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran, yang menyebabkan banyak aset tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Selain itu, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait dalam hal penjadwalan dan pengawasan pemeliharaan aset turut menjadi hambatan utama. Hal ini mengakibatkan sejumlah aset mengalami penurunan kualitas dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam jangka panjang, yang pada akhirnya berpotensi merugikan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, E-BMD telah mengintegrasikan fitur pemeliharaan aset yang secara otomatis mencatat jadwal perawatan dan memberikan notifikasi terkait kebutuhan perawatan rutin. Fitur ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih proaktif

dalam mengelola pemeliharaan aset, mengurangi risiko kerusakan atau hilangnya nilai aset karena kelalaian. Dengan sistem yang terstruktur, Dinas Pertanian dapat memantau kondisi setiap aset secara lebih teratur dan transparan, sehingga proses pemeliharaan menjadi lebih efisien. Namun, meskipun fitur ini sudah tersedia, implementasinya belum optimal. Kendala utama terletak pada kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengoperasikan sistem digital tersebut serta terbatasnya kemampuan teknis dalam menindaklanjuti laporan yang dihasilkan oleh sistem.

Lebih jauh lagi, keberhasilan dalam pemeliharaan aset tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada komitmen pengelola dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan berkelanjutan. Pelatihan yang memadai untuk staf terkait serta alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran untuk kebutuhan pemeliharaan menjadi faktor krusial dalam memastikan implementasi E-BMD berjalan dengan baik. Tanpa adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan koordinasi yang efektif antarinstansi, manfaat dari fitur pemeliharaan aset dalam E-BMD tidak akan sepenuhnya terasa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan untuk memaksimalkan fungsi pemeliharaan aset guna mendukung efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan BMD di Kota Kendari.

Penghapusan Aset

Penghapusan aset tetap dapat didefinisikan sebagai proses yang digunakan perusahaan untuk menghapus aset tetap dari laporan keuangannya (Kledo.com). Proses penghapusan aset merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang bertujuan untuk mengeliminasi aset-aset yang sudah tidak layak pakai atau tidak lagi memberikan manfaat bagi instansi pemerintah. Di Kota Kendari, proses penghapusan aset sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh prosedur administrasi yang kompleks dan lambat. Hal ini memperlambat penanganan aset yang sudah usang, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penumpukan aset yang tidak terpakai dan mengurangi efisiensi pengelolaan ruang penyimpanan dan sumber daya lainnya. Masalah ini menjadi tantangan utama dalam memastikan bahwa seluruh aset yang sudah tidak produktif dapat segera dihapus dari daftar aset pemerintah daerah.

Penerapan E-BMD di Kota Kendari menawarkan solusi dengan mengotomatisasi proses penghapusan aset melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Sistem ini memungkinkan identifikasi aset yang sudah memenuhi syarat untuk dihapus secara otomatis, meminimalisir risiko kesalahan administratif dan mempercepat pengambilan keputusan terkait penghapusan aset. Selain itu, E-BMD juga mempermudah penyusunan

laporan penghapusan aset yang terintegrasi dengan laporan keuangan daerah, sehingga proses pengawasan dan audit menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, E-BMD tidak hanya meningkatkan efisiensi proses penghapusan aset, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan BMD secara keseluruhan.

Namun, meskipun E-BMD telah memberikan banyak manfaat, tantangan dalam implementasi penghapusan aset tetap ada. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pelatihan yang memadai bagi pegawai pemerintah daerah dalam mengoperasikan sistem E-BMD secara optimal. Tanpa pemahaman yang baik tentang prosedur dan pemanfaatan sistem ini, upaya untuk mempercepat penghapusan aset melalui E-BMD masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan yang berkelanjutan, sehingga pegawai dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan mendukung kelancaran penghapusan aset secara efektif dan efisien..

Implementasi dalam E-BMD (Electronic Barang Milik Daerah)

Implementasi E-BMD (Electronic Barang Milik Daerah) bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah secara efektif dan efisien. Beberapa variabel yang diteliti dalam implementasi ini meliputi: Modernisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, efisiensi administrasi, Transparansi dan Akuntabilitas, Prinsip Good Governance, Pengurangan Ketergantungan pada Intervensi Manual

Modernisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Modernisasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui implementasi sistem E-BMD telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola aset di Kota Kendari. Sebelumnya, pengelolaan aset dilakukan secara manual dengan prosedur yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Dengan adanya E-BMD, seluruh proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset kini dapat dilakukan secara digital dan real-time. Hal ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pendataan aset, tetapi juga meminimalisir potensi kesalahan yang sering terjadi dalam pencatatan manual, seperti data yang duplikat atau tidak sinkron.

Selain itu, modernisasi ini memungkinkan proses audit dan pengawasan aset menjadi lebih mudah dan transparan. Data yang terintegrasi dalam E-BMD memfasilitasi akses cepat oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk auditor dan pengelola aset, sehingga proses audit dapat dilakukan dengan lebih efisien. Jika pada sistem manual, auditor harus memeriksa dokumen fisik dan melakukan verifikasi aset secara langsung di lapangan, dengan E-BMD, data aset dapat diakses secara digital dan diperiksa dari jarak jauh.

Kemudahan ini berdampak pada efisiensi waktu dan sumber daya, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

E-BMD juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Dalam sistem yang manual, pejabat pengambil keputusan sering kali harus menunggu laporan yang disusun secara berkala, yang bisa saja sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Namun, dengan sistem E-BMD, pejabat dapat langsung mengakses informasi terkini tentang kondisi aset, nilai buku, serta status penggunaannya, sehingga keputusan terkait pengadaan, pemeliharaan, atau penghapusan aset dapat dilakukan secara lebih tepat waktu. Selain itu, E-BMD memudahkan penyusunan rencana strategis pengelolaan aset dengan menyediakan data historis yang komprehensif, yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam perencanaan jangka panjang.

Meski demikian, penerapan modernisasi ini juga menghadapi beberapa tantangan, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan sistem E-BMD menjadi salah satu kunci utama keberhasilan modernisasi ini. Di Kota Kendari, meskipun sistem E-BMD telah diterapkan, masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem ini secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan. Infrastruktur teknologi yang andal juga penting, mengingat sistem E-BMD sangat bergantung pada koneksi internet dan perangkat keras yang memadai. Jika infrastruktur tidak mendukung, maka potensi sistem ini untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan BMD tidak akan tercapai secara maksimal.

Efisiensi Administrasi

Penerapan E-BMD di Dinas Pertanian Kota Kendari telah membawa dampak positif terhadap efisiensi administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sebelum adanya sistem E-BMD, proses pencatatan dan pelaporan aset dilakukan secara manual, yang memakan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan serta meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pencatatan aset. Dengan adanya E-BMD, seluruh proses administrasi menjadi terotomatisasi, sehingga data aset dapat diakses secara cepat, real-time, dan lebih akurat. Hal ini tidak hanya memudahkan pengelolaan aset, tetapi juga mempercepat alur kerja dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah.

Automasi dalam pencatatan aset melalui E-BMD memungkinkan pengurangan biaya operasional yang signifikan. Sebelumnya, pengelolaan aset manual membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, serta penyusunan laporan.

Dengan sistem digital, beban kerja tersebut berkurang drastis karena semua data aset tercatat dan terintegrasi dalam satu platform yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Pengurangan kebutuhan akan tenaga administratif ini tidak hanya berdampak pada efisiensi waktu, tetapi juga pada penghematan anggaran operasional yang dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih strategis.

Lebih lanjut, peningkatan efisiensi administrasi juga terlihat dari kemudahan dalam penyusunan laporan dan pemantauan aset. E-BMD menyediakan fitur pelaporan otomatis yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan aset dalam berbagai format sesuai kebutuhan, baik untuk keperluan internal maupun eksternal, seperti audit atau evaluasi kinerja. Selain itu, data aset yang selalu terbarukan memudahkan pemantauan secara berkelanjutan, sehingga aset yang rusak atau sudah tidak terpakai dapat segera diidentifikasi dan diambil tindakan. Efisiensi ini juga berdampak pada peningkatan transparansi, di mana proses pencatatan dan pelaporan aset dapat dengan mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, tantangan dalam penerapan E-BMD masih ada, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia. Dalam beberapa kasus, akses terhadap internet yang tidak stabil dan terbatasnya pemahaman pegawai mengenai penggunaan sistem baru menjadi hambatan dalam mengoptimalkan efisiensi administrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki infrastruktur pendukung serta memberikan pelatihan intensif kepada pegawai agar mereka dapat mengoperasikan sistem E-BMD secara optimal. Dengan demikian, diharapkan efisiensi administrasi dalam pengelolaan aset di Dinas Pertanian Kota Kendari dapat terus meningkat, sejalan dengan tujuan pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola aset yang lebih baik dan transparan.

Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan E-BMD di Dinas Pertanian Kota Kendari telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Transparansi, sebagai salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, menjadi lebih mudah diwujudkan dengan adanya sistem digital. E-BMD memungkinkan data terkait aset daerah dapat diakses secara lebih luas oleh para pemangku kepentingan, baik dari kalangan internal pemerintah maupun masyarakat umum. Ini penting karena sebelumnya, pengelolaan aset cenderung bersifat tertutup dan sulit untuk dipantau secara efektif. Dengan E-BMD, informasi tentang status aset, nilai, dan penggunaannya dapat diakses secara real-time, sehingga masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Lebih jauh, sistem ini juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD. Setiap tahapan dalam proses pengelolaan aset, mulai dari pengadaan hingga penghapusan, terekam dengan baik dalam sistem dan dapat diaudit kapan saja. Akuntabilitas tercipta ketika setiap tindakan terkait aset, termasuk transaksi dan keputusan yang diambil oleh para pengelola aset, dapat dilacak kembali dan dipertanggungjawabkan. Ini memberikan kepastian bahwa semua proses berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan meminimalkan peluang terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan aset. Selain itu, dengan adanya pelaporan yang lebih akurat dan mudah diakses, pihak manajemen aset dapat lebih cepat merespon jika terjadi ketidaksesuaian dalam pengelolaan aset.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini tidak hanya bermanfaat bagi internal pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Dengan data yang dapat diakses oleh masyarakat, E-BMD membantu menciptakan mekanisme pengawasan publik yang lebih kuat. Ketika masyarakat dapat melihat bagaimana aset daerah dikelola dan dimanfaatkan, hal ini secara tidak langsung memaksa pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola aset tersebut. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka, di mana keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan tata kelola yang baik dan berkelanjutan (Supardianto & Tampubolon, 2020).

Namun, meskipun sistem ini telah membawa banyak kemajuan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Tantangan utama adalah kesiapan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem E-BMD secara maksimal. Kurangnya pelatihan yang berkesinambungan bagi pegawai yang bertugas mengelola aset sering kali menyebabkan kurang optimalnya penerapan E-BMD. Selain itu, infrastruktur teknologi di beberapa daerah masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas data secara real-time. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penguatan infrastruktur teknologi agar transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari penerapan E-BMD dapat tercapai secara optimal (Rakhmawati, 2023).

Prinsip Good Governance

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui sistem E-BMD di Dinas Pertanian Kota Kendari merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance dikenal dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, dan tanggung jawab. Melalui E-BMD, prinsip-prinsip ini secara efektif diterapkan dalam pengelolaan aset daerah. Sistem ini memastikan bahwa setiap aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah

dapat dilacak dan dikelola dengan baik, meminimalkan risiko penyalahgunaan atau kehilangan aset. Selain itu, E-BMD juga mendukung pelaporan yang lebih transparan, di mana data tentang aset dapat diakses oleh pihak yang berwenang serta masyarakat luas.

Prinsip partisipasi dalam good governance juga tercermin melalui E-BMD, karena sistem ini membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara tidak langsung dalam pengawasan aset daerah. Dengan menyediakan akses informasi yang jelas dan akurat, masyarakat dapat memonitor bagaimana pemerintah daerah mengelola aset yang dimiliki. Ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan aset. Partisipasi masyarakat dalam memantau BMD bukan hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Selain transparansi dan partisipasi, akuntabilitas juga menjadi salah satu aspek penting dari good governance yang diwujudkan melalui sistem E-BMD. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan jelas. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terautomasi, data pengelolaan aset dapat diakses kapan saja untuk keperluan audit atau evaluasi. Ini memastikan bahwa tidak ada celah bagi penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur, karena semua proses pengelolaan terekam secara sistematis.

Namun, meskipun penerapan prinsip good governance melalui E-BMD menunjukkan banyak kemajuan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Tantangan terbesar terletak pada kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas dalam mengoperasikan sistem secara optimal. Kurangnya pemahaman mendalam tentang teknologi serta keterbatasan pelatihan bagi para pegawai sering kali menyebabkan penggunaan E-BMD belum mencapai potensi maksimalnya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai dalam hal teknologi informasi, serta peningkatan infrastruktur pendukung, sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance dapat terus diterapkan dengan baik dalam pengelolaan BMD di Kota Kendari.

Pengurangan Ketergantungan pada Intervensi Manual

Pengurangan ketergantungan pada intervensi manual dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Dinas Pertanian Kota Kendari merupakan salah satu dampak positif dari implementasi sistem E-BMD. Sebelum penerapan E-BMD, proses pencatatan dan pelaporan aset dilakukan secara manual, yang sering kali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Manualisasi pengelolaan aset juga menyulitkan pelacakan riwayat aset secara

akurat, mengakibatkan terjadinya duplikasi pencatatan atau kehilangan data penting. Dengan E-BMD, seluruh proses pencatatan aset kini diotomatisasi, sehingga informasi terkait aset daerah dapat diperbarui dan diakses secara real-time.

Otomatisasi ini membawa perubahan besar dalam hal kecepatan dan akurasi. Proses yang sebelumnya membutuhkan banyak intervensi manusia, seperti penginputan data, pelaporan, hingga pemantauan aset, kini dilakukan dengan lebih efisien melalui E-BMD. Pengurangan ketergantungan pada intervensi manual ini juga secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas data aset yang dikelola. Sistem yang terintegrasi memungkinkan sinkronisasi data dari berbagai instansi, sehingga mengurangi risiko inkonsistensi data yang sering ditemukan dalam metode manual. Sebagai hasilnya, pemerintah daerah dapat memperoleh data yang lebih akurat untuk keperluan evaluasi, audit, atau pengambilan keputusan terkait aset daerah.

Selain itu, pengurangan intervensi manual juga berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BMD. Sistem otomatisasi E-BMD memastikan setiap transaksi atau perubahan status aset tercatat secara detail dalam sistem, yang dapat ditelusuri kapan pun diperlukan. Hal ini tidak hanya mempermudah proses audit dan pengawasan internal, tetapi juga memberikan jaminan akuntabilitas kepada masyarakat. Pengelolaan aset yang lebih teratur dan transparan ini memungkinkan publik untuk memantau bagaimana aset-aset daerah dikelola, serta mendorong kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Namun, meskipun E-BMD telah memberikan banyak manfaat, tantangan dalam mengurangi ketergantungan pada intervensi manual masih ada, terutama dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia. Beberapa pegawai mungkin masih kurang familiar dengan teknologi yang digunakan, yang menghambat proses transisi sepenuhnya dari metode manual ke digital. Selain itu, diperlukan pemeliharaan dan pengembangan sistem secara berkelanjutan untuk memastikan E-BMD tetap relevan dan mampu mengatasi permasalahan yang mungkin muncul di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus menginvestasikan sumber daya dalam pelatihan pegawai dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk memastikan keberhasilan penuh dari pengurangan intervensi manual dalam pengelolaan BMD.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-BMD di Dinas Pertanian Kota Kendari telah meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

terutama dalam pencatatan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Meskipun begitu, kendala pemahaman teknologi dan keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran masih menjadi tantangan. Rekomendasi untuk optimalisasi mencakup pelatihan berkelanjutan bagi pegawai dan peningkatan alokasi anggaran. Dengan langkah-langkah yang tepat, E-BMD memiliki potensi besar untuk mendukung pengelolaan aset yang lebih efektif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Nana Syaodih Sukmadinata (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Praktik
PT. Remaja Rosdakarya di Bandung, Indonesia

Jurnal:

Ali, R. R., Karamoy, H., & Warongan, J. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 72–81. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17174>

Kusuma Dewi, A. R., & Nugraheni, A. P. (2020). Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Tahun 2018/2019. *Jurnal Ilmiah MEA,* 4(3), 761–776.

La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho,* 5(3), 626–642.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>

Lahada, G. (2021). Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie,* 16(1), 34–42.

Nurul Mutiah, Theresia Meirati, A. S. S. (2020). Tata Kelola Manajemen Aset Ti Menggunakan Framework Cobit 5 Dan Itam. *Coding Jurnal Komputer Dan Aplikasi,* 8(2).
<https://doi.org/10.26418/coding.v8i2.41264>

Rusmawanti, S., Witanti, W., & Sabrina, P. N. (2020). Sistem Informasi Manajemen Aset pada PT. Gamma Solusi Karya Nusantara. *Prosiding SISFOTEK,* 4(1), 25–29.

Simatupang, J., Mustafa, B., & ... (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2021. *Jack: Journal of*, 1(1), 87–110.

Syahputra, K., Syaukat, Y., & Irvanto, A. K. (2019). Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah,* 9(2), 1–14. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27636

World Wide Web:

Benedictus Adithia (2023). Asset Maintenance: Pengertian, Kebijakan, dan Penerapannya. <https://rederp.co.id/blog/asset-maintenance/?form=MGOV3>. diakses 2 Oktober 2024

Hastings, Nicholas Anthony John. 2015. Physical Asset Management: With an Introduction to ISO55000. 2 ed. Switzerland: Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-14777-2>

Kledo.com. Cara Penghapusan Aset Tetap dan Jurnalnya.

<https://kledo.com/blog/penghapusan-aset-tetap/?form==MGOV3>. diakses 2 Oktober 2024

